

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Keluarga sering disebut sebagai institusi terkecil yang ada di masyarakat. Di dalamnya kita dapat menelusuri banyak hal. Mulai dari hubungan antar individu, hubungan otoritas, pola pengasuhan, pembentukan karakter, masuknya nilai-nilai masyarakat dan lain-lain. Dalam berbagai kebudayaan yang ada di dunia setidaknya ada dua bentuk keluarga. Pertama, keluarga batih/inti (*nuclear family*). Kedua, keluarga besar (*extended family*).

Keluarga batih atau keluarga inti merupakan gejala umum dari sebuah keluarga. Bentuk ini terlihat dari komposisinya yang paling dasar, terdiri atas ayah, ibu dan anak. Keluarga ini tidak terlalu banyak bergantung pada keluarga besar. Keluarga batih berfungsi sebagai tempat pengasuhan rasional yang lebih intim, ada hubungan yang intim dan intensif diantara anggotanya. Sedangkan keluarga besar merujuk pada keluarga inti dengan penambahan anggota keluarga selain anak, misalnya paman, bibi, orangtua dari pasangan suami istri, saudara atau kerabat sedarah lainnya. Kehadiran keluarga besar umumnya berfungsi untuk membantu pengasuhan anak, biasanya dilakukan oleh kakek nenek dari salah satu pasangan suami istri (Meinarno & Silalahi, 2010).

Pada keluarga batih terdapat resiko atau permasalahan yang dapat mengganggu intimasi dalam keluarga jika tidak ditangani dengan baik. Beberapa

masalah tersebut adalah masalah kedudukan / peranan, yaitu perlunya kesepakatan kedudukan dalam keluarga, apakah hubungan diantara anggotanya bersifat egaliter / sejajar atau tidak.

Kemudian mengenai permasalahan anak dimana keluarga batih cenderung kekurangan dukungan dalam pengasuhan, biasanya jika pasangan suami istri sama-sama bekerja maka pengasuhan anak menjadi masalah yang krusial. Ketika pasangan suami istri bekerja dan anak sedang dalam kondisi sakit / memerlukan perhatian maka situasi yang rumah sepi atau tidak adanya orang disekitar anak dapat membuat anak merasa tidak dipedulikan dan semakin sakit.

Permasalahan lainnya adalah keamanan dalam keluarga, seringkali kejahatan lebih mudah terjadi pada keluarga yang jumlah anggotanya sedikit / dalam rumah yang sedikit penghuninya. Masalah lain dalam keluarga batih adalah pengeluaran ekstra untuk menunjukkan perhatian pada keluarga besar yang jarang ditemui (Advantages And Disadvantages Of Nuclear Family, 2010).

Apabila permasalahan dalam keluarga batih ini dibiarkan tanpa solusi, maka intimasi dalam keluarga menjadi terancam dan keluarga menjadi tidak resilien. Keluarga batih dapat menjadi resilien jika tiap anggotanya bersama-sama menunjukkan komunikasi positif dan usaha mencari solusi terbaik dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.

Menurut Olson dan DeFrain (2004), keluarga sebagai komitmen antara dua orang atau lebih untuk berbagi keintiman (*sharing intimacy*), sumber daya, pengambilan keputusan, tanggung jawab dan nilai. Menurut *US Bureau of the*

Census, keluarga adalah dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan karena kelahiran, perkawinan atau adaptasi dan tinggal bersama. Menurut *American Association of Family and Consumer Sciences*, keluarga adalah dua orang atau lebih yang berbagi sumber daya, tanggung jawab untuk mengambil keputusan, berbagi nilai dan tujuan dan memiliki komitmen satu sama lain. Sedangkan menurut *Family Service of America*, keluarga saling memberikan dukungan emosi, fisik dan ekonomi dan idealnya memiliki ciri-ciri *intimacy*, intensitas, keberlanjutan dan komitmen antar anggotanya (Handayani, dkk., 2008).

Keluarga merupakan lingkungan utama tempat setiap manusia menjalani kehidupan. Keluarga merupakan sistem sosial terkecil di masyarakat yang dapat berkembang menjadi sebuah sistem masyarakat yang lebih luas. Keluarga dipandang sebagai ikatan dari individu-individu yang saling berinteraksi dan saling bergantung yang memiliki tujuan, kekuatan dan nilai-nilai serta berbagi tempat hidup dalam alur kehidupan mereka (Darling, 2005).

William Ogburn (1938) pernah mengemukakan pendapatnya tentang fungsi sebuah keluarga, yaitu keluarga sebagai fungsi ekonomi, fungsi pemberi kedudukan dan status terhadap anggotanya, fungsi pendidikan tidak hanya pada bayi tetapi juga pada orang muda, fungsi proteksi terhadap anggotanya, fungsi religiusitas atau beribadah bersama, fungsi rekreasi dan yang terakhir adalah fungsi afeksi diantara anggotanya (dalam Eshleman, 1985). Pembentukan kepribadian dari tiap anggota keluarga, pembentukan status, sosialisasi pengasuhan, manajemen tekanan, perubahan anggota, kerjasama ekonomi, reproduksi, stabilisasi orang dewasa merupakan sekian hal dari sebuah fungsi

keluarga (Veenhoven, 1983; Essex & Kessler, 1982; Weaver & Glenn, 1981 dalam Eshleman, 1985).

Mekanisme perubahan dalam keluarga amat beragam. Salah satunya perubahan peran dalam keluarga yang relatif cepat. Pemahaman umum menempatkan laki-laki sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, tetapi sekarang tidak lagi. Perempuan juga mampu menjadi pencari nafkah, bahkan bukan tidak mungkin pendapatannya lebih tinggi dari suaminya. Pernikahan antar golongan juga semakin intens terjadi di sekitar kita. Pernikahan ini bisa antar suku bangsa, antar ras, antar kelas, bahkan sesama jenis kelamin sudah mulai terjadi.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini diantaranya adalah pesatnya perkembangan transportasi dan komunikasi, terjadinya industrialisasi pembangunan sektor produksi dan jasa yang menyerap banyak tenaga kerja, peningkatan jumlah penduduk dunia dimana kemiskinan dan laju urbanisasi juga meningkat seiring waktu. Peningkatan penduduk yang tidak diiringi dengan peningkatan jumlah makanan dan pekerjaan hasilnya berupa kemiskinan dalam jumlah yang besar juga (Meinarno & Silalahi, 2010).

Permasalahan dalam lingkungan sosial pun dapat menyebabkan terjadinya disorganisasi keluarga. William J. Goode (dalam Soekanto, 1990:370) menyatakan bahwa disorganisasi keluarga merupakan perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya. Secara sosiologis bentuk-bentuk disorganisasi keluarga antara lain adalah unit keluarga yang tidak lengkap karena hubungan di luar

perkawinan, lalu disorganisasi keluarga karena perceraian dan perpisahan, adanya fenomena *empty shell family* karena kurangnya komunikasi diantara anggota keluarga dan terdapat krisis keluarga karena ditinggalkan oleh kepala keluarga.

Dalam jaman modern ini banyak terjadi disorganisasi keluarga dikarenakan konflik peranan sosial atas dasar perbedaan ras, agama atau faktor sosial-ekonomis serta ketidakseimbangan dari perubahan unsur-unsur warisan sosial (*social heritage*), contohnya pada jaman dulu suami / ayah yang bekerja mencari nafkah, tetapi dalam jaman industrialisasi sekarang ini, istri / ibu juga ikut bekerja. Contoh lainnya adalah pola pendidikan anak jaman sekarang sebagian diserahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan diluar rumah misalnya sekolah. Pada hakikatnya, disorganisasi keluarga pada masyarakat yang sedang dalam keadaan transisi menuju masyarakat yang modern dan kompleks disebabkan karena keterlambatan penyesuaian diri dengan situasi sosial-ekonomis yang baru (Soekanto, 1990:371).

Tekanan keluarga juga bisa datang bukan hanya berasal dari keluarga inti saja tetapi juga berasal dari masalah keluarga besar, tetangga dan masyarakat serta tuntutan ekonomi yang semakin berat akan menjadi beban tersendiri bagi para suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga (Doxbury, 1999 dalam Prasetyo, 2007:12). Tekanan keluarga dapat merupakan permasalahan yang seringkali dihadapi oleh keluarga misalnya seperti kesulitan ekonomi atau kemiskinan, bencana alam, mengalami kecelakaan, dan menghadapi masalah yang cukup pelik seperti konflik pasutri misalnya perselingkuhan, konflik keluarga misalnya

perbedaan yang bersifat SARA, kematian / kehilangan, sakit penyakit, berurusan dengan hukum dll, yang membuat seseorang merasakan kesedihan dan putus asa.

Setiap keluarga memiliki budaya, aturan dan pola yang unik. Idealnya sebuah keluarga adalah setiap kelompok atau individu yang menyediakan lingkungan yang aman dan terpercaya yang mendorong pembelajaran dan perkembangan yang sehat, namun demikian tidak ada keluarga yang kebal terhadap konflik, tantangan, ataupun stres (Elsaerodji, 2010).

Bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia menyebabkan banyak keluarga mendadak menjadi miskin karena mereka kehilangan sumber daya ekonomisnya. Oleh karena bencana alam, banyak keluarga harus kehilangan rumah, harta benda, tempat kerja bahkan anggota keluarga. Para keluarga korban bencana alam ini kekurangan sumber makan dan minuman, pelayanan kesehatan, kehilangan pekerjaan. Hal-hal inilah yang menjadi faktor resiko bagi keluarga karena mereka harus berhadapan dengan hilangnya kesejahteraan hidup yang awalnya mereka miliki sebelum bencana itu terjadi (S.o.s.i.a.l : Kemiskinan, 2010).

Kasus pemotongan urat nadi anak berusia 7 bulan oleh ibu kandungnya, membuat sedih mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Meutia Hatta. Dia menyebut kasus kekerasan anak seperti yang terjadi di Jombang, Jawa Timur itu salah satunya timbul karena persoalan kemiskinan yang sampai sekarang belum bisa teratasi (Kekerasan Anak Akibat Kemiskinan, 2012). Hal senada juga datang dari Ketua Komnas Perlindungan

Anak Arist Merdeka Sirait yang menyatakan bahwa kemiskinan menjadi sumber utama kekerasan terhadap anak-anak Indonesia yang dilakukan orangtua, paman, bibi, kakak, bahkan nenek dan kakek yang seharusnya menjadi pelindung mereka. Kondisi ekonomi anak korban kekerasan buruk. Sebanyak 280 anak menjadi korban kekerasan fisik dan 466 anak menjadi korban kekerasan seksual. Sebagian besar korban adalah siswa sekolah dasar (Menkokesra, 2012). Hal kekerasan pada anak karena kemiskinan ini juga merupakan faktor resiko yang dihadapi oleh keluarga dan memerlukan penanganan dini agar tidak berlarut menjadi sebuah pengalaman traumatis.

Biasanya, angka kemiskinan berkorelasi positif dengan penyakit, baik fisik maupun mental, dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ibarat pepatah, *sudah jatuh tertimpa tangga pula*. demikian pula halnya dengan warga miskin, sudah kemiskinan demikian melilit, masih harus ditambah oleh ancaman berbagai penyakit yang menyerang dari segala penjuru. Sukses tidaknya pemberantasan berbagai penyakit yang mengancam sangat bergantung pada ada tidaknya dukungan dari seluruh masyarakat. Mulai dari pola hidup yang harus lebih diperbaiki dan sanitasi lingkungan diperhatikan, serta perilaku seksual yang sehat, termasuk setia kepada pasangan dan tidak menggunakan obat-obat terlarang. Yang paling pokok adalah bagaimana kita berjuang melawan akar berbagai persoalan tersebut, yakni kemiskinan itu sendiri (Kesehatan Lingkungan, 2010). Sakit penyakit menjadi faktor resiko dalam keluarga miskin. Mereka yang sudah kekurangan sumber daya ekonomis masih harus dibebani dengan biaya kesehatan

yang tidak sedikit meskipun sudah menggunakan surat tanda miskin untuk mendapatkan keringanan biaya kesehatan.

Dalam sebuah studi longitudinal yang dilakukan oleh Werner (1993; Werner & Smith, 1992 dalam Walsh, 2003) dengan mengikuti masa awal kehidupan hampir 700 anak-anak dari pekerja perkebunan di Kauai, pulau Hawaii yang berasal dari beragam budaya dan hidup dalam kemiskinan. Pada usia mereka ke-18 sekitar dua per tiga anak-anak beresiko tinggi tersebut mengalami hal-hal menyedihkan atau mengalami beragam faktor resiko sebagaimana yang telah diprediksikan, yaitu kehamilan di usia muda, membutuhkan pelayanan kesehatan mental serta mengalami permasalahan di sekolah maupun dengan hukum.

Namun sekitar dua per tiganya dari anak-anak tersebut telah berkembang menjadi anak muda yang berkompeten, penuh kasih dan penuh percaya diri, dengan kapasitas diri yang "bekerja dengan baik, bermain dengan baik dan penuh kasih" dalam ukuran yang beragam. Lalu di kehidupan tengah bayanya hampir semuanya masih tetap hidup dalam kehidupan yang baik. Banyak yang memiliki kestabilan pernikahan dan pekerjaan, serta hanya beberapa saja yang mengalami trauma akibat badai yang menghancurkan pulau Hawaii.

Sebagai catatan tambahan, beberapa anak yang tadinya tidak mampu berfungsi dengan baik di masa remajanya, ketika pada masa dewasanya mereka mengalami perubahan kehidupan, kebanyakan karena mendapatkan pengaruh religiusitas dan dukungan hubungan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa

meskipun penuh masalah di masa anak-anak maupun remaja, tetapi tetap ada potensi resiliensi di sepanjang masa kehidupan. Faktor resiko yang dialami anak-anak tersebut mendorong mereka untuk menumbuhkan kemampuan beresiliensi.

Pada penelitian ilmu sosial, beberapa peneliti mengemukakan kemiskinan sebagai masalah sosial adalah faktor yang paling membuat seseorang berada dalam “resiko”. Kemiskinan dianggap sebagai faktor resiko bagi seseorang oleh karena faktor ini merupakan mediator atau variabel yang memfasilitasi terjadinya perilaku bermasalah (Luttar, 1999 dalam Issabela, 2010). Kalil, 2003 menyatakan bahwa faktor resiko yang utama adalah kemiskinan, kehilangan pekerjaan, perceraian, kematian, penyakit kronis serta ketidaksuburan (dalam Rini, 2009). Faktor resiko merupakan variabel-variabel yang telah terbukti menyebabkan efek yang dapat secara langsung meningkatkan kemungkinan munculnya akibat maladaptif (Davis, 1999 dalam Pratiwi, 2009).

Seperti dikatakan diatas bahwa faktor resiko merupakan mediator atau variabel yang memfasilitasi munculnya permasalahan perilaku dimana faktor resiko ini dapat datang dari dalam individu, keluarga ataupun dari sisi yang paling luas yaitu masyarakat. Perilaku-perilaku bermasalah yang muncul akibat adanya faktor resiko misalnya keterlibatan dalam kejahatan, kekerasan maupun pelecehan, kegagalan dalam studi bagi anak-anak usia sekolah, kehamilan dini karena kurangnya proses afeksi dan komunikasi antara anak dan orangtua, maupun perilaku anti sosial, dll.

Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga miskin dengan resiko tinggi pada kegagalan pendidikan akhirnya menjadi orangtua muda dan hidup dalam kemiskinan sebagaimana orangtuanya (Orthner & Randolph, 1999; NCFR Policy Brief, 2003 dalam Orthner, Jones-Sanpei & Williamson, 2004:160; 53). Hal-hal ini merupakan perilaku bermasalah yang muncul akibat kontinuitas munculnya faktor-faktor resiko tanpa disertai resiliensi.

Faktor-faktor resiko pada kemiskinan yang paling nampak menonjol dalam penelitian ini yaitu permasalahan kebutuhan dalam keluarga yang belum terpenuhi, kematian atau kehilangan keluarga terdekat, disorganisasi lingkungan atau kurangnya sumber daya yang dibutuhkan keluarga, masalah keuangan dan terjadinya konflik atau ketegangan dalam keluarga campuran.

Sedangkan faktor-faktor resiko lainnya yang mengikuti adalah transisi dalam keluarga seperti keluar masuknya anggota keluarga karena perpindahan tempat tinggal, pekerjaan ataupun perceraian, permasalahan PHK atau tidak memiliki pekerjaan, permasalahan berprestasi di sekolah bagi anak-anak pada keluarga miskin, masalah *insecurity* bertempat tinggal, masalah sakit penyakit atau pun kebutuhan perawatan kesehatan dalam jangka panjang, kekerasan dan pelecehan dalam rumah tangga atau di lingkungan tempat tinggal, permasalahan psikis dan emosi serta fertilitas.

Faktor-faktor resiko dalam penelitian ini selaras dengan hasil penelitian oleh Edin dan Lein, 1997; Orthner dan Randolph, 1999; Secombe, 2002 (dalam Orthner, Jones-Sanpei & Williamson, 2004) yang menyatakan bahwa keluarga

dengan penghasilan rendah adalah rumah tangga dengan beragam masalah substansial yang seperti kekerasan di lingkungan maupun dalam rumah tangga, permasalahan di sekolah bagi anak-anak keluarga miskin, kehamilan usia dini, pengangguran, tekanan dan konflik dalam keuangan karena kesulitan membuat keputusan keuangan akibat kurangnya sumber daya yang dimiliki, dll.

Berdasarkan hasil survei, Dirjen Bimas Islam menyatakan bahwa faktor ekonomi juga menjadi faktor kedua sebagai pencetus adanya perceraian setelah faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga (Dirjen Bimas Islam, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa sebuah pernikahan membutuhkan kestabilan kondisi ekonomi agar keluarga yang terbentuk dalam pernikahan tersebut tidak terlantar secara finansial, setidaknya kebutuhan hidup yang primer harusnya dapat tercukupi dengan baik.

Tabel 1.1 Penyebab Perceraian*Sumber Data : Dirjen Bimas Islam, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA*

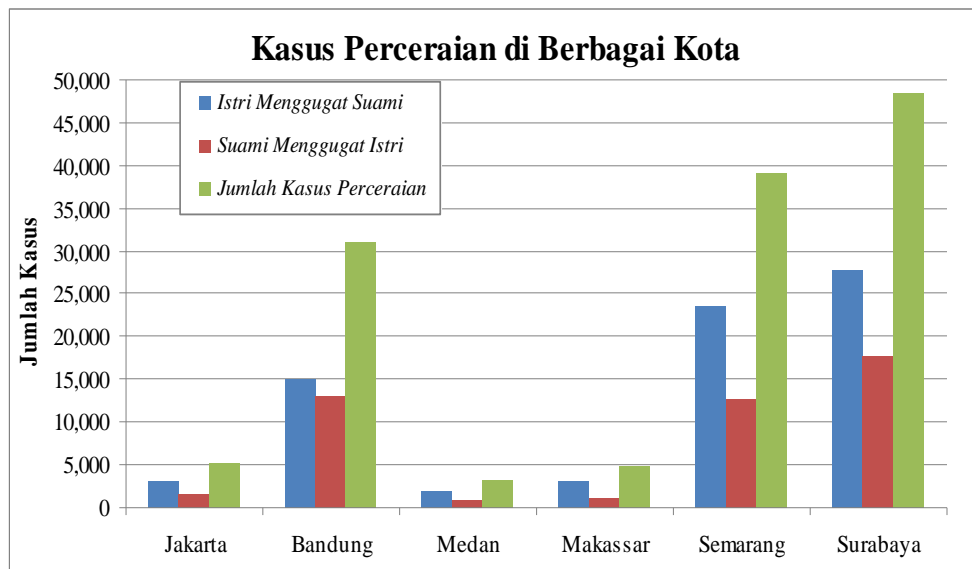
Faktor Penyebab	Jumlah Kasus	Persentase
Ketidakharmonisan Rumah Tangga	46,723	55.4%
Faktor Ekonomi	24,252	28.7%
Krisis Keluarga	4,916	5.8%
Cemburu	4,708	5.6%
Kawin Paksa	1,692	2.0%
Penganiayaan dan KDRT	916	1.1%
Poligami	879	1.0%
Kawin Bawah Umur	284	0.3%
Total	84,370	99.9%

Demikian juga dengan jumlah perceraian di Indonesia dalam kurun waktu 2004-2008 yang meningkat tajam. Pada 2004 rata-rata 20 ribu hingga 30 ribu per tahun, namun pada 2008 telah terjadi 200 ribu kasus perceraian dari 2 juta pernikahan yang ada. Tampak adanya peningkatan sebesar 900% dalam 4 tahun.

Tabel 1.2 Jumlah Perceraian di Indonesia pada Kurun Waktu 2004-2008*Sumber Data : Dirjen Bimas Islam, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA*

Tahun	Jumlah Rata-Rata	Peningkatan
2004	20,000-30,000 Kasus	900% selama 4 tahun atau bertambah 36,000 kasus setiap tahun
2008	200,000 Kasus	

Di wilayah Jawa Timur sendiri, tahun 2003 sejumlah 40.391 pasangan bercerai. Tahun 2004 meningkat menjadi 42.769 dan tahun 2005 mencapai 55.509 kasus perceraian. Pada gambar dibawah ini juga menunjukkan bahwa kota Surabaya menduduki tempat paling tinggi dalam kasus perceraian di berbagai kota besar di Indonesia (Kasus Perceraian di Surabaya, 2011).



Gambar 1.1
Tingkat Perceraian dan Gugatan antara Suami Istri

Menurut Kepala BKKBN, Sugiri Syarief, tingginya angka perceraian tersebut tak lepas dari minimnya pengetahuan pasangan suami istri terhadap fungsi sebuah keluarga. Menurut pandangan mereka, perkawinan, memiliki anak dan punya keluarga dianggap sebagai hal yang biasa yang tidak membutuhkan persiapan apapun. (Madjid, 2009). Perceraian yang terjadi dalam keluarga dapat menjadi faktor resiko bagi mereka. Hal ini dikarenakan dengan terjadinya

perpisahan antara pasangan suami istri maka tidak ada lagi keutuhan di dalam sebuah keluarga dimana hal ini beresiko pada hilangnya kohesivitas dalam keluarga dan keberfungsian sebuah keluarga secara utuh.

Efek faktual dalam perceraian antara lain timbulnya pengasuhan orangtua tunggal, perlunya proses adaptasi pasca perceraian atau membiasakan diri khususnya bagi anak-anak yang tidak lagi tinggal bersama orangtua yang lengkap, jikalau keluarga yang bercerai tersebut berada pada golongan miskin maka biaya hidup akan ditanggung sendiri tanpa adanya keterlibatan dari pasangan lagi, biaya hidup ini akan bertambah jika ada anggota keluarga seperti anak atau orangtua yang masih ditanggung.

Demikian pesatnya perceraian di Indonesia memperlihatkan bahwa ketahanan keluarga-keluarga di Indonesia begitu rapuh. Sedikit memiliki masalah diantara pasangan, maka penyelesaian yang diambil adalah jalur perceraian. Padahal sebagai lingkungan terdekat, keluarga punya peranan dalam pembentukan orang-orang di dalamnya.

Sebuah bangsa yang kuat berawal dari sebuah keluarga dan ikatan kemasyarakatan yang kuat. Jika keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang terpecah, maka ikatan kemasyarakatannya akan lemah dan akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia itu sendiri.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Badan Pusat Statistik pada tahun 2009 mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia telah mencapai angka 32,53 juta orang atau 14,15%. Sebenarnya angka ini telah menurun jika dibandingkan dengan tahun 2008 dimana angka penduduk miskin mencapai 34,96 juta orang atau 15,42% (Meinarno & Silalahi, 2010).

Namun sayangnya kondisi ekonomi di Indonesia masih belum stabil sepenuhnya sehingga membuat banyak orang kesulitan mendapat pekerjaan ataupun penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rasanya sudah bukan jamannya lagi budaya suami bekerja dan istri menjadi ibu rumah tangga saja berlaku di Indonesia, bagi keluarga ekonomi lemah, mau tidak mau suami dan istri harus sama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga miskin tidak memiliki sumber ekonomi yang dibutuhkan untuk menjamin kesempatan pertumbuhan fisik, ekonomi dan emosi bagi seluruh anggotanya.

Keluarga yang tidak bekerja, setengah menganggur atau bekerja dengan gaji minim tampak menghadapi kesulitan dalam beberapa hal semisal dalam mencukupi kebutuhan makan, kebutuhan akan kesehatan dan perawatan anak yang layak (Boushey & Gundersen, 2001 dalam Orthner, Jones-Sanpei & Williamson, 2004:160; 53). Keluarga yang bekerja tetapi miskin juga beresiko memiliki kehidupan yang tidak terjamin dan tampak memiliki masalah dengan

kelayakan tempat tinggal dan keamanan (Caraley, 2001; Chavkin, Romero & Wise, 2000 dalam Orthner, Jones-Sanpei & Williamson, 2004:160; 53).

Fenomena kemiskinan di Indonesia bukan hal yang baru, pada umumnya kemiskinan terjadi disebabkan karena adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi, persediaan lahan garapan yang sempit dan kurangnya jumlah pangan yang tersedia (Mubiarto, 1983 dalam Yuda, 2010). Menurut Bank Dunia, aspek dari kemiskinan yaitu pendapatan yang rendah, kekurangan gizi atau keadaan kesehatan yang buruk serta pendidikan yang rendah (Fery, 2008).

Penduduk miskin adalah mereka yang berpendapatan lebih rendah dari garis kemiskinan yang ditetapkan. Artinya orang yang dikategorikan miskin jika jumlah pengeluarannya lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Arbiyah, 2008 dalam Suparyanto, 2011). Williams, Sawyer & Wahlstrom, 2008 (dalam Meinarno & Silalahi, 2010) mengatakan bahwa keluarga miskin terhubung melalui darah, pernikahan, atau adopsi dan tinggal bersama dimana rata-rata pendapatan per kapita per bulan masing-masing orang tersebut berada di bawah garis kemiskinan yang membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum untuk keperluan fisik dan kebutuhan dasar lainnya.

Kemiskinan seringkali muncul tanpa disadari kehadirannya oleh yang bersangkutan. Menurut Suparlan, 1993; Sahdan, 2005 (dalam Meinarno & Silalahi, 2010) kesadaran mengenai kemiskinan ini biasanya muncul ketika seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain yang memiliki tingkat sosial ekonomi lebih baik. Kemiskinan memberikan dampak pada mereka yang

mengalaminya, seperti sulitnya mengakses pendidikan yang berkualitas, menabung atau berinvestasi, dan tidak adanya jaminan sosial serta perlindungan terhadap keluarga.

Kemiskinan juga berpengaruh terhadap kualitas hubungan suami istri, jumlah penghasilan yang rendah dapat mengakibatkan tekanan dan ketidakpuasan terhadap situasi keuangan pasangan sehingga pasangan tersebut menjadi lekas marah dan mudah bertengkar yang berakibat pada kualitas hubungan orangtua dan anak yang cenderung memperlakukan anak dengan kasar dan penuh kekerasan. Orangtua yang sibuk bekerja mencari nafkah dan kurang berinteraksi dengan anak membuat pola asuh menjadi tidak efektif.

Menurut Suparyanto (2011), masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi aset.

Menurut Panjaitan (2000), tingginya angka kemiskinan ini membuat orang-orang yangalaminya kesulitan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan. Permasalahan lain yang muncul adalah banyaknya balita kurang gizi, anak putus sekolah atau bahkan tidak bersekolah, dan sulitnya mengakses pelayanan kesehatan yang baik (dalam Meinarno & Silalahi, 2010).

Penghasilan yang rendah juga membuat keluarga miskin mengalami berbagai macam hambatan untuk memenuhi kebutuhan fisik, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak. Disamping itu, akses mereka untuk memenuhi kebutuhan psikologis, seperti memuaskan minat, memelihara hubungan dengan orang lain dan mengembangkan potensi juga terhalangi, walaupun hal menyatakan bahwa semakin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan psikologis seseorang, maka akan semakin baik kondisi psychological well-being orang tersebut (Meinarno & Silalahi, 2010).

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan dimana tingkat pendidikan yang tidak tinggi membuat pekerjaan mereka hanya berkisar pada jenis-jenis pekerjaan yang mengandalkan fisik seperti kuli, buruh, dan lain sebagainya dimana hal ini juga berdampak pada perolehan penghasilan yang rendah (Meinarno & Silalahi, 2010). Pekerjaan dengan penghasilan rendah berkaitan dengan resiliensi keluarga. Keluarga dengan penghasilan yang rendah cenderung mengalami persoalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya oleh karena keuangan yang terbatas, tetapi ketika keluarga mampu memandang positif terhadap kondisi hidupnya yang terbatas tersebut dan mampu mencari cara-cara kreatif untuk menambah pemasukan maka keluarga tersebut dapat dikatakan telah berproses untuk menjadi resilien.

Penggolongan kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum.

Berdasarkan kriteria ini maka dikenal kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, sedangkan komunitas yang masuk dalam kemiskinan relatif adalah mereka yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relatif mereka masih dibawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada disekitarnya (Suparyanto, 2011).

Dalam analisis dan penghitungan kemiskinan tahun 2008 oleh BPS (BPS, 2012), dikemukakan bahwa kemiskinan terdapat beberapa macam, diantaranya adalah kemiskinan relatif yang merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Lalu ada jenis kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Kemudian ada jenis kemiskinan struktural yang disebabkan oleh keadaan struktural yang tidak adil, kondisi yang menyebabkan masyarakat terperangkap dalam situasi sosial yang tidak adil sehingga mereka kesulitan mengakses peluang untuk memberdayakan diri sehingga mereka menjadi berkekurangan. Contoh

kemiskinan struktural ini terjadi karena situasi daerah yang terisolir seperti suku Mentawai di kepulauan Mentawai, dll.

Selanjutnya ada jenis kemiskinan kultural yang disebabkan oleh adanya adat atau budaya tertentu yang menghalangi seseorang untuk melakukan perubahan yang lebih baik dalam kehidupannya. Aturan budaya tersebut yang membelenggu pola pikir masyarakat sehingga mereka terus berada dalam “ketidakberdayaan” dan tidak maju. Contoh kemiskinan kultural terjadi di suku-suku terasing dari dunia luar seperti suku Badui Dalam di Banten Selatan, suku Dayak di Kalimantan dan suku Kubu di Jambi.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2004 menggunakan kriteria kesejahteraan keluarga untuk mengukur kemiskinan. Lima pengelompokan tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut :

1. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan.

2. Keluarga Sejahtera I

Keluarga sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang digunakan, yaitu :

- a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.
- b. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- c. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- d. Bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
- e. Bila anak atau anggota keluarganya yang lain sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan.

3. Keluarga Sejahtera II

Keluarga selain dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dapat pula memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya. Indikator yang digunakan terdiri dari lima indikator pada Keluarga Sejahtera I ditambah dengan sembilan indikator sebagai berikut :

- a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing.

- b. Sekurang-kurangnya sekali seminggu keluarga menyediakan daging atau ikan atau telur sebagai lauk pauk.
- c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru setahun terakhir.
- d. Luas lantai rumah paling kurang 8,0 m² untuk tiap penghuni rumah.
- e. Seluruh anggota keluarga dalam tiga bulan terakhir berada dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
- f. Paling kurang satu orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas mempunyai penghasilan tetap.
- g. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
- h. Seluruh anak berusia 6-15 tahun saat ini (waktu pendataan) bersekolah.
- i. Bila anak hidup dua orang atau lebih pada keluarga yang masih PUS, saat ini mereka memakai kontrasepsi (kecuali bila sedang hamil).

4. Keluarga Sejahtera III

Keluarga telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum dan kebutuhan sosial psikologisnya serta sekaligus dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, tetapi belum aktif dalam usaha kemasyarakatan di

lingkungan desa atau wilayahnya. Mereka harus memenuhi persyaratan indikator pada Keluarga Sejahtera I dan II serta memenuhi syarat indikator sebagai berikut :

- a. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- b. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
- c. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan ini dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar-anggota keluarga.
- d. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
- e. Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang sekali dalam enam bulan.
- f. Memperoleh berita dengan membaca surat kabar, majalah, mendengarkan radio atau menonton televisi.
- g. Anggota keluarga mampu mempergunakan sarana transportasi.

5. Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga selain telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dan kebutuhan sosial psikologisnya, dapat pula memenuhi kebutuhan pengembangannya, serta sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif pula mengikuti gerakan semacam itu dalam

masyarakat. Keluarga-keluarga tersebut memenuhi syarat-syarat indikator pada Keluarga Sejahtera I sampai III dan ditambah dua syarat berikut :

- a. Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
- b. Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat lainnya.

(Kemiskinan : Pengertian, Dimensi, Indikator, dan Karakteristiknya, 2012).

BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan dalam melihat kemiskinan, diantaranya adalah pendekatan kebutuhan dasar, pendekatan pendapatan, pendekatan kemampuan dasar serta pendekatan obyektif dan subyektif. Dari pendekatan-pendekatan tersebut, maka indikator utama kemiskinan dapat dilihat dari :

1. Kurangnya kebutuhan pangan, sandang dan papan yang layak.
2. Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif.
3. Kurangnya kemampuan membaca dan menulis.
4. Kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup.
5. Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi.
6. Ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah.
7. Akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas.

(Indikator Kemiskinan dan Upah Minimum Region, 2012).

Kelemahan dalam pemenuhan sumber-sumber daya ekonomis merupakan pendorong keluarga berpenghasilan rendah untuk mengembangkan resiliensinya. Pada umumnya, keluarga ini menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam rumah tangga, misalnya tempat tinggal yang layak, makanan bergizi, pendidikan yang layak, pakaian, dll. Kemampuan mereka untuk memenuhi hal-hal tersebut terbatas oleh penghasilan dan dukungan ekonomis mereka (Orthner, Jones-Sanpei & Williamson, 2004).

Keluarga yang tidak bekerja, keluarga yang bekerja musiman, keluarga yang bekerja dengan penghasilan rendah cenderung menghadapi kesulitan dalam beberapa area kebutuhan, seperti pemenuhan kebutuhan makan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan perawatan anak yang layak (Boushey & Gundersen, 2001 dalam Orthner, Jones-Sanpei & Williamson, 2004). Keluarga bekerja tetapi hidup dalam kemiskinan juga cenderung menghadapi kesulitan dalam area pemenuhan kebutuhan untuk tempat tinggal yang aman dan layak (Caraley, 2001; Chavkin, Romero & Wise, 2000 dalam Orthner, Jones-Sanpei & Williamson, 2004).

Pada beberapa penelitian, ternyata ditemukan juga fenomena keluarga berpenghasilan rendah yang mampu menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik dalam kemiskinannya. Mereka mampu membangun strategi kreatif dalam mengatasi kemiskinannya meskipun kehidupan miskin yang mereka jalani disertai oleh faktor-faktor resiko faktual dalam hidup sehari-hari mereka seperti kekerasan, pelecehan, kondisi kekurangan dalam makanan, dll (Edin & Lein, 1997 dalam Orthner, Jones-Sanpei & Williamson, 2004).

Sukses menghadapi faktor-faktor resiko yang menekan, beradaptasi dengan faktor-faktor resiko tersebut dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan berada pada kondisi penuh masalah dan memiliki penilaian positif terhadap pengalaman-pengalaman traumatis maupun pengalaman negatif lainnya mendorong munculnya sumber-sumber kekuatan dalam keluarga yang berakibat pada resiliensi keluarga (Fraser, Richman, Galinsky, 1999 dalam Orthner, Jones-Sanpei & Williamson, 2004).

1.3. BATASAN MASALAH

Seperti yang telah dibahas pada identifikasi masalah diatas dikatakan bahwa tidak ada keluarga yang bebas dari masalah. Semua keluarga menghadapi beragam permasalahan dalam kehidupannya, khususnya keluarga yang berada dalam taraf kemiskinan atau berpenghasilan rendah. Dikatakan keluarga jenis ini merupakan keluarga yang rentan terhadap masalah atau resiko oleh karena keterbatasan sumber daya ekonomis yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan mereka.

Pada penelitian ini, penulis ingin mengkaji pengaruh faktor resiko dan faktor proteksi terhadap resiliensi keluarga, khususnya pada keluarga miskin yang termasuk dalam jenis kemiskinan relatif yaitu keluarga yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relatif mereka masih dibawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada disekitarnya atau keluarga yang berada dalam kondisi miskin karena pengaruh kebijakan

pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Keluarga dalam konteks kemiskinan relatif atau berpenghasilan rendah ini difokuskan pada keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (berdasarkan indikator BKKBN) dan indikator keluarga miskin berdasarkan pendekatan BAPPENAS dengan besaran penghasilan maksimal adalah sebesar upah minimum regional (UMR) kota Surabaya yaitu Rp 1.257.000,00 (UMK Surabaya Ditetapkan Rp1,257 juta) dan dengan faktor tingkat pendidikan yang tidak tinggi dengan pekerjaan yang hanya berkisar pada jenis-jenis pekerjaan sederhana seperti kuli, buruh, *cleaning service*, *security*, operator alat berat, pembantu rumah tangga, kernet, tukang ojek, dll.

Penelitian ini dibatasi pada pengaruh yang terjadi antara faktor resiko dan faktor protektif terhadap resiliensi keluarga berpenghasilan rendah dimana faktor resiko difokuskan pada masalah-masalah kemiskinan keluarga dan faktor protektif difokuskan pada sumber-sumber kekuatan yang dimiliki keluarga miskin tersebut.

Faktor resiko adalah sebagai prediktor awal dari hal atau peristiwa yang tidak menguntungkan dan sesuatu yang membuat seseorang menjadi rentan pada hal atau peristiwa tersebut. Faktor resiko ini berasal dari dalam diri dan lingkungan sekitar individu (Kalil, 2003 dalam Aprilia, 2009). Faktor resiko mencakup hal-hal yang dapat menyebabkan dampak buruk, seperti kondisi fisik yang kurang menguntungkan, kemiskinan, hubungan keluarga yang kurang harmonis, serta

pengalaman traumatis yang pernah dialami sebelumnya dan belum teratasi (Suyasa&Wijaya, 2006 dalam Aprilia 2009).

Selaras dengan Suyasa dan Wijaya serta Kalil, Faktor resiko pada penelitian ini adalah hal-hal yang rentan akan dampak buruk, yaitu kemiskinan yang meliputi permasalahan faktual berupa permasalahan keuangan / ekonomi, sakit penyakit / kondisi fisik yang kurang menguntungkan, konflik / hubungan keluarga yang kurang harmonis / ketegangan dalam keluarga, pengangguran, kematian / kehilangan, kekerasan / pelecehan, dan perbedaan budaya.

Faktor protektif adalah faktor-faktor yang menjadi pelindung, yang berperan dalam menurunkan dampak dari faktor resiko dalam kehidupan keluarga (Issabela, 2010). Faktor protektif merupakan suatu proses dalam keluarga yang mampu membuat keluarga berhasil bertahan dari krisis. Sebuah keluarga yang dikatakan resilien tidak harus menunjukkan semua ciri-ciri dari faktor protektif sepanjang waktu dan dalam segala kondisi. Pengaruh faktor protektif sangat bergantung pada konteks (Walsh, 1998 dalam Issabela, 2010).

Faktor-faktor protektif tersebut diantaranya adalah komitmen, kelancaran komunikasi, penghargaan terhadap anggota keluarga, adanya nilai-nilai religius dan moralitas, adanya kerjasama, mengembangkan cinta kasih, adanya waktu bersama keluarga, adanya kohesivitas dalam keluarga, adanya budaya / kebiasaan keluarga, adanya hubungan yang saling mendukung antar anggotanya (Brotherson, 2004). Sumber-sumber kekuatan ini menolong para individu dan keluarganya untuk dapat menghadapi krisis dan tantangan yang datang terus

menerus dengan baik sehingga mereka dapat bertumbuh dan dipulihkan dari beragam pengalaman yang penuh masalah itu (Cowan, Cowan & Schultz, 1996 dalam Walsh, 2003).

Resiliensi merupakan kemampuan untuk bertahan dan bangkit dari tantangan hidup yang menghancurkan, resiliensi ini melibatkan proses dinamis dalam pemeliharaan kemampuan adaptasi positif terhadap beberapa permasalahan (Luthar, Cicchetti, & Bekker, 2000 dalam Walsh, 2003). Konsep dari resiliensi keluarga memandang bahwa tiap anggota keluarga adalah sumber potensial untuk resiliensi individu dalam menghadapi resiko dan resiliensi dalam keluarga sebagai sebuah unit fungsional (Walsh, 1996 dalam Walsh, 2003).

Interaksi dinamis antara faktor resiko (*risk factor*) dan faktor protektif (*protective factor*) sebagai hasil adaptasi akan memampukan keluarga untuk menjadi lebih resilien (Suyasa & Wijaya, 2006 dalam Issabela, 2010). Resiliensi muncul dari interaksi signifikan antara faktor resiko dan faktor protektif. Keberhasilan proses adaptasi pada faktor resiko dalam penelitian ini berasal dari pengaruh faktor-faktor protektif yang dimiliki keluarga.

Resiliensi keluarga merujuk kepada proses *coping* dan adaptasi dalam keluarga sebagai unit fungsional. Kondisi resilien bisa dilihat dari hadirnya interaksi antara faktor resiko dan faktor protektif. Adanya salah satu faktor saja tanpa kehadiran faktor yang lain tidak dapat menjadikan individu menjadi keluarga yang resilien (Kalil, 2003 dalam Issabela, 2010). Resiliensi diperoleh dari keberhasilan seseorang mengatasi masalah, bukan karena lari atau

penghindaran akan suatu masalah. Resiliensi muncul bersamaan dengan adanya faktor resiko atau kesengsaraan dalam hidup (Kalil, 2003 dalam Rini, 2009).

Resiliensi adalah kapasitas untuk bangkit kembali dari kesulitan / permasalahan, menjadi lebih kuat dan berdaya guna (Walsh, 1998 dalam Lietz, 2006). Hal ini menegaskan bahwa resiliensi melibatkan dua fenomena, yaitu sistem yang mengalami kesulitan / permasalahan yang dalam studi ini merupakan faktor resiko dan sistem yang mampu menghindari konsekuensi-konsekuensi negatif atau faktor resiko dalam rangka mendukung pertumbuhan.

Smokowski (1998) menjelaskan proses resiliensi sebagai sebuah interaksi antara faktor resiko dan faktor protektif. Model ini menegaskan bahwa faktor protektif yang juga dapat dianggap sebagai kekuatan, berinteraksi dengan faktor resiko yang pada akhirnya menurunkan dampak negatif dari faktor resiko tersebut (Fraser, Richman & Galinsky, 1999; Garmezy, 1994; Rutter, 1990 dalam Lietz, 2006). Pada model ini, resiliensi tidak sekedar membangkitkan kekuatan kembali, tetapi juga melibatkan kehadiran kekuatan-kekuatan untuk menolong orang-orang bertahan dari kesulitan dan semakin berpotensi untuk bertambah kuat.

Sebuah sistem masyarakat akan dapat bertahan kuat apabila didukung dengan sub-sistem yang kuat pula. Dalam suatu sistem masyarakat terdapat individu-individu yang memiliki perbedaan latar belakang seperti kebudayaan, tingkat ekonomi, status sosial dan lain-lain dimana hal tersebut bertendensi untuk menimbulkan masalah dalam suatu sistem masyarakat apabila tidak didukung dengan proses resiliensi yang baik. Persatuan dan kesatuan anggota keluarga

dapat menjadi pondasi penting sebuah resiliensi keluarga, sehingga permasalahan yang ada tidak membuat keluarga menjadi pecah melainkan semakin bersatu untuk mencapai solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya resiliensi dalam keluarga maka dapat mewujudkan kesuksesan hubungan berkeluarga (Poulsen, 2003).

1.4. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Apakah ada pengaruh antara variabel faktor resiko (X1) dan faktor protektif (X2) terhadap resiliensi keluarga berpenghasilan rendah (Y) ?”

1.5. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh faktor resiko dan faktor protektif terhadap resiliensi keluarga.

1.6. MANFAAT PENELITIAN

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Menambah khasanah informasi dan hasil penelitian dalam bidang psikologi khususnya mengenai kajian tentang resiliensi dalam keluarga.
2. Memberikan gambaran mengenai pengaruh faktor resiko dan faktor protektif terhadap resiliensi keluarga yang berpenghasilan rendah.
3. Pandangan resiliensi keluarga dapat dijadikan sebuah peta konsep berharga untuk mengarahkan upaya preventif dan intervensi dalam mendukung dan menguatkan keluarga-keluarga yang mengalami permasalahan.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Penggunaan faktor proteksi untuk mengembangkan sebuah pemahaman yang baik terhadap apa yang sedang dihadapi oleh keluarga.
2. Pemahaman ini menolong keluarga untuk menerima dan mengerti kondisi mereka serta menurunkan efek negatif dari faktor resiko keluarga.

3. Mengembangkan wawasan keluarga terhadap sebuah permasalahan sehingga mereka dapat mengatasinya secara efektif dan menjadi keluarga yang sehat.